

MULTIKULTURALISME, NARASI ISLAMISME, DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL

Muhammad Hanief¹, Ilda U'us Damayanti² Farhatun Nisa'ul Hamidah³

Zumrotul Urfi Nazilla⁴

Universitas Islam Malang¹, Universitas Islam Malang²

Universitas Islam Malang³ Universitas Islam Malang⁴

e-mail: ¹muh.hanief@unisma.ac.id ²22001015016@unisma.ac.id

³22001015023@unisma.ac.id ⁴22001015025@unisma.ac.id

Abstrak

Kondisi masyarakat majemuk di tengah kondisi global memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, dan kehidupan layak dengan kompetisi yang dilakukan sehari-hari tanpa disadarinya. Namun multikulturalisme memberikan dampak negatif bagi mereka yang kehilangan peluang dalam hidupnya hingga pada akhirnya membangun narasi negatif melalui sekte atau kelompok yang dibentuk dengan mengatasnamakan identitas agama mayoritas. Kondisi inilah yang menjadikan negara waspada terhadap narasi Islamisme atas dasar kepentingan kelompok dan berdampak pada gerakan ekstrimisme. Kondisi global menjadikan semua orang memiliki kesempatan dalam melakukan edukasi melalui apapun dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui penelitian ini, akan dijabarkan konsep multikulturalisme yang selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan mewaspadi narasi Islamisme di tengah kondisi Global. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus.

Kata Kunci: multikulturalisme, islamisme, dan globalisasi

Abstract

The condition of a plural society amidst global conditions has both positive and negative impacts. The positive impact is to provide opportunities for all people to get the same opportunities and rights such as getting education, a place to live, and a decent life with competitions that are carried out daily without realizing it. However, multiculturalism has a negative impact on those who have lost opportunities in their lives and eventually build negative narratives through sects or groups built on behalf of the identity of the majority of the occupation with a religious label. This condition makes the state alert to the narrative of Islamism based on group interests and has an impact on the extremist movement. Global conditions make everyone have the opportunity to carry out education through anything and are not limited by space and time. Through this research, the concept of multiculturalism that is in harmony with the conditions of Indonesian society will be explained by observing the narrative of Islam in the midst of global conditions. The research method uses a descriptive qualitative approach and type of case study research.

Keywords: multiculturalism, Islamism, and globalization

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau "plural society", (Nasikun, 1989: 31) bahkan ada yang menyebut "dual society". Kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia adalah

: (1) keadaan geografis, yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa. Wilayah Indonesia terdiri dari kurang lebih 3000 mil dari Timur ke Barat dan lebih dari 1000 mil dari Utara ke Selatan. (2) Indonesia terletak antara samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh pertama kali yang menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sesudah Masehi". Pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang pluralistic (Ichtiyanto, 2005: 47-48).

Indonesia juga sebagai salah satu negara yang multikultural terbesar didunia, kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Dengan jumlah yang ada diwilayah NKRI sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen protestan, hindu, budha, konghucu, serta berbagai macam kepercayaan (Diknas: 2004).

Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang sekarang ini dihadapi bangsa ini. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu. Contoh konkrit terjadinya tragedy pembunuhan besar-besaran terhadap pengikut partai PKI pada tahun 1965, kekerasan etnis cina di Jakarta pada bulan mei 1998 dan perang antara islam Kristen di maluku utara pada tahun 1999-2003.

Demonstrasi kolosal yang lebih dikenal dengan "Aksi Damai 411" dan "Aksi Damai 212". Aksi ini diikuti oleh jutaan orang yang datang dari berbagai daerah dengan modal transportasi, juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Genderang yang ditabuh oleh Habieb Rieziq sebagai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) diikuti dan diamini oleh hampir semua organisasi Islam baik secara individu maupun organisasi. Di luar tuntutan politis untuk segera menghukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menistakan agama, aksi damai ini dapat dilihat dari beberapa perspektif di antaranya adalah dari budaya populer. Secara umum dapat ditengarai bahawa Aksi Bela Islam I hingga III lebih banyak diwarnai oleh kelompok muslim perkotaan.

Dewasa ini tengah marak narasi-narasi islamisme dalam media massa yang merupakan sebuah bukti masyarakat yang sedang berada dalam keadaan konflik.

Narasi merupakan sebuah tahap awal proses ideologisasi kelompok islamis. Mengetahui narasi yang berkembang di kalangan kelompok islamis akan terpetakan isu-isu apa saja yang menjadi narasi utama dalam gerakan kelompok islamis serta bagaimana narasi tersebut beroperasi (Maarif, 2016: 188).

Kondisi demikian tidak terlepas dari globalisasi telah merasuk dalam jiwa masyarakat Indonesia. Globalisasi merupakan pemicu berkembangnya isu multikulturalisme dan Islamisme, karena globalisasi merupakan sebuah proses yang mengaburkan batas negara, mengintegrasikan ekonomi, budaya, teknologi, dan pemerintahan, sehingga menciptakan hubungan ketergantungan yang semakin kompleks. Selain itu, Globalisasi telah berhasil memperluas jangkauan dan mempercepat aliran modal, barang, orang, dan gagasan yang melintasi batas-batas negara-bangsa (Noris, 2000: 155). Sifat kebergantungan dan kemudahan akses yang disediakan oleh Globalisasi membuat multikulturalisme dan Islamisme berkembang di berbagai negara. Perkembangan yang terjadi tidak diiringi oleh pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai kedua perihal tersebut, memberikan peluang untuk terjadi pertikaian sebagaimana yang dicontohkan termasuk peristiwa ketegangan dan segregasi antarkelompok atas dasar stereotip dan prasangka (*prejudice*) (Allport, 1954).

Peristiwa stereotip dan prasangka yang muncul akibat dari globalisasi dapat menciptakan iklim perang dingin bagaikan apa dalam genggaman tak terlihat tetapi suhu panas terus meningkat akibat kesenjangan ekonomi, pengaruh trauma sejarah, ketegangan politik, dan ketidakpastian hukum. Jika perang dingin terus menerus meningkat, maka akan Meletus menjadi pertikaian terbuka atau kekerasan berdarah akibat gagal paham dengan konsep beragama (Islamisme) dan bernegara (multikulturalisme). Oleh karena itu melalui artikel ini memberikan penjelasan tentang peluang dan tantangan globalisasi dengan menjadikan konsep multikulturalisme sebagai paham hidup berdampingan antar berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Islamisme sebagai paham yang tidak mengganggu kondisi masyarakat majemuk dan esensi Islam sebagai agama Cinta dan Kasih Sayang (*Rahmatan lil Alamin*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Multikultural

Berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya), multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur)

yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau (meskipun tidak seluruhnya berpenghuni), terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa, memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% (dengan catatan ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi pemerintah, namun di kartu tanda penduduk menyebut diri sebagai pemeluk agama resmi pemerintah), dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.

Masyarakat awam umumnya mengenal multikulturalisme dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan realitas multikultural di tengah masyarakat (Heywood, 2007). Parekh (1997) membedakan lima model multikulturalisme:

1. Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.
4. Multikulturalisme kritis/interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (concerned) dengan kehidupan

kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka. 5. Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batasbatas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaanpercobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Azra, 2007).

Selain multikulturalisme deskriptif, sebetulnya ada lagi multikulturalisme normatif, yakni suatu sokongan positif, bahkan perayaan atas keragaman komunal, yang secara tipikal didasarkan entah atas hak dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui, atau atas keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh lewat tatanan masyarakat yang lebih luas keragaman moral dan kulturalnya (Heywood, 2007: 313). Multikulturalisme normatif melibatkan kebijakan sadar, terarah, dan terencana dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme.

Menurut Parekh (2001), ada tiga komponen multikulturalisme, yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi dasarnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

Setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan. Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang— bukan kolektif—berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (founders). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri

nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing. Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri.

Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia belum menentukan secara normatif model multikulturalisme macam apa yang harus diterapkan di negeri ini. Selain membutuhkan kajian-kajian antropologis yang lebih mendalam, tampaknya juga diperlukan kajian filosofis terhadap multikulturalisme itu sendiri sebagai sebuah ideologi. Berbeda dari yang dipahami orang awam, ternyata multikulturalisme mengandung asumsi-asumsi problematis yang harus sebaiknya dikenali, diakui sepenuhnya atau direvisi sesuai realitas khas setiap negeri, sebelum pemerintah dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya menormatifikannya.

Multikulturalisme dalam Tinjauan Sejarah

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (M. Atho Mudzhar, 2005: 174).

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, dan Australia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan juga pendidikan multikultur. Ini dikarenakan mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil

mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya.

Dalam sejarahnya, multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar White Anglo Saxon Protestant (WASP) diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.

Bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan multiculturalism, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit (M. Atho Mudzhar, 2005: 180-183).

Sedangkan multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan *Bhineka Tunggal Ika* serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa

Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Dengan demikian multikulturalisme di Indonesia menyediakan wadah untuk penampakan “yang lain”. Kehadiran “yang lain” itu harus dipahami tanpa reduksi, atau distorsi. “Yang lain” itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi atau disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman destruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi (Susi Fitri, 2005: th).

Narasi Islamisme: dari Wacana Hingga Gerakan

Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi merupakan satu bentuk karangan atau tulisan yang bersifat menyebarkan sesuatu berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi mementingkan urutan kronologis suatu peristiwa, kejadian, dan masalah. Karangan narasi mendahulukan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan waktu (Mahmudi, 2013: 182).

Narasi merupakan bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi, adapun ciri-ciri karangan narasi yaitu: (1) menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, (2) dirangkai dalam urutan waktu, (3) berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi, dan (4) ada konflik. Berdasarkan tujuan atau sasarannya, narasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada para pembaca, Narasi sugestif adalah narasi yang disusun dan disajikan sekian macam, sehingga mampu menimbulkan daya khayal para pembaca (Mahmudi, 2013: 182-183).

Pada zaman dahulu penduduk tidak begitu padat, kepemilikan lahan relative masih luas. Penduduk mulai mengalami ledakan baru setelah tahun 1970-an. Biasanya setelah bersih-bersih rumah, menyapu, memasak, menunggu suami pulang dari sawah, lading ataupun bekerja sebagai buruh, para istri biasa bermain kerumah tetangga alias nonggo. Karena tak ada pekerjaan lagi, biasa hidup santai, biasanya menghabiskan waktu untuk ngobrol, menggossip, bergunjing, sambil mencari kutu. Itu cerita masa lalu. Begitu memasuki daerah digital, setelah Mark Zuckerberg, mahasiswa drop out Universitas Harvard, Amerika Serikat menemukan media sosial bernama facebook tahun 2004, cerita mulai berubah.

Seperti virus, facebook mulai diakrabi di Indonesia sejak 2008 sampai sekarang. Negeri ini menjadi negeri peringkat kelima pemakai medsos. Tak kurang dari 60 juta penduduknya punya gadget. Survey dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa (Puspita, 2017: 40-41).

Selanjutnya, di media sosial dan massa tidak jarang kerap kali digunakan untuk tujuan politik dan sebagainya melalui narasi-narasi yang tersebar didalamnya. Seperti narasi yang tengah marak beredar di sosial media dan massa terkait Aksi Damai 411 dan 212 yang memang merupakan sebuah fenomena yang spektakuler. Media online merupakan salah satu ruang yang digunakan untuk melakukan radikalasi (Fikri, 2013: 265). Narasi merupakan cerita yang disampaikan oleh surat kabar, novel, komik, film, dan sebagainya. Media sebagai penyampai adalah narrator yang memberikan perspektif terhadap beritanya.

Perjumpaan antara Islam dan modernitas yang berasosiasi dengan Barat menghasilkan paling tidak tiga tanggapan yaitu reformisme, sekularisme dan Islamisme. Kalangan reformis berpandangan bahwa umat Islam dapat mengambil beberapa hal positif dari pencapaian pemikiran Barat untuk diadaptasi demi kemajuan Islam. Kalangan sekular menilai bahwa apa yang dicapai oleh Barat melalui sekularismenya (memisahkan antara agama dan politik) adalah jalan terbaik yang juga dapat ditempuh oleh umat Islam. Kalangan Islamis berpendapat bahwa Islam mempunyai sistem yang telah lengkap dan final sehingga apa yang datang dari Barat adalah thagut yang mesti ditolak. Islamisme adalah istilah yang sering diasosiasikan dengan sistem pemikiran atau ideologi yang memahami Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga hendak menjadikannya dasar negara (al-Din wa al-Daulah).

Meskipun beberapa pengamat menunjuk adanya doktrin tekstual dalam Islam yang cenderung mendorong penganutnya untuk terlibat dengan Islamisme, sulit untuk menyangkal kenyataan bahwa ide itu sendiri dikemukakan dalam lanskap politik sekuler. Nanti akan diperlihatkan bahwa persoalan Islamisme adalah persoalan modern. Dengan kata lain, ide dasar Islamisme bukan usaha untuk menghidupkan kembali mimpi Abad Pertengahan di Abad Modern, melainkan bagian dari paradoks yang dihasilkan oleh janji kemoderenan itu sendiri (Mudzakir, 2016: 37-38).

Istilah "Islamisme" pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Prancis terkemuka, Voltaire, sebagai pengganti kata "mahometisme" yang ketika itu dipakai sebagai acuan untuk "agama orang Arab" di kalangan orang Eropa. Kata ini lalu diadopsi ke dalam bahasa Inggris pada edisi 1900 Oxford English Dictionary.

Akan tetapi, setelah itu istilah ini sekian lama jarang digunakan. Akhir-akhir ini, ketika Islam politik menjadi topik utama dalam politik internasional pasca-perang dingin, Islamisme sekali lagi menjadi istilah yang dipakai secara luas oleh para sarjana dan wartawan. Sekarang secara umum istilah itu mengacu pada jenis tertentu dari interpretasi agama, organisasi dan gerakan di kalangan umat Islam yang menekankan keunikan dan keunggulan Islam vis-à-vis ideologi politik lainnya. Istilah Islamisme sering juga dipertukarkan dengan istilah fundamentalisme dan salafisme (Mudzakir, 2016: 38).

Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya, tidak jarang hal-hal negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat yang dicurigai. Hal yang demikian terjadi karena masyarakat Barat mampu menguasai pers yang dijadikan instrumen yang kuat untuk memroyeksikan kultur dominan dari peradaban global. Sehingga yang ditangkap masyarakat dunia adalah apa yang didefinisikan dalam media-media Barat (Ummah, 2012: 115).

Label Islam digunakan untuk menyebut gerakan fundamentalis sangat menyenangkan bagi pers Barat ketimbang label Tamil di Srilangka, militan Hindu di India, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan Yahudi sayap kanan, sekte kebatinan di Jepang atau bahkan musuh lamanya, komunis-marxis yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah (Ummah, 2012: 115-116). Contoh yang sangat jelas adalah aksi tutup mulut para elit politik Barat atau aksi bicara dalam kepura-puraan ketika melihat praktik kekerasan yang dilakukan oleh ekstrimis Yahudi atau pun serdadu Israel atas orang-orang Arab Palestina. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kekerasan ini secara faktual sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pelaku garis keras “radikalisme Islam.” Tetapi sebutan radikalisme lebih kental ditujukan kepada gerakan Islam.

Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islaisme di Indonesia

Masyarakat Indonesia terdiri dari jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya yang beraneka ragam. Perbedaan ini merupakan sebuah kekayaan dan juga sesuatu yang dapat dijadikan bahan-bahan untuk mencapai berbagai kebutuhan. Akan tetapi, tidak semua orang menyadari hal tersebut, sehingga cenderung bersikap individualistik, kurang peduli terhadap masyarakat, tidak melihat bahwasannya keberlangsungan dan

ketertiban masyarakat sangat berpengaruh kepada ketentraman hidupnya. Masyarakat memiliki fungsi sebagai penerus budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini berlangsung secara dinamis, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi media sebagai alih budaya ialah pendidikan dan interaksi sosial.

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan suatu gambaran dari kondisi yang tengah ada dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu berbanding lurus adakalanya mengalami kesenjangan. Beberapa faktor kesenjangan yaitu kesenjangan ekonomi, perseteruan politik, perebutan kekuasaan, persaingan antar agama. Sebagian besar konflik yang ada "agama" dinilai menjadi salah satu faktor yang ikut andil sebagai pemicu (Naim, 2010: 14).

Dewasa ini marak adanya Narasi Islamisme yang tengah beredar ditengah masyarakat. Narasi Islamisme merupakan salah satu bentuk beberapa atau sekelompok masyarakat yang tidak dapat memaknai sebuah keragaman dengan benar. Narasi Islamisme ini bertujuan untuk melahirkan sebuah usaha dari sebagian atau beberapa kelompok yang menginginkan imajinasinya menjadi nyata. Adapun yang menjadi target penerus ialah para remaja atau pemuda yang kemudian diiming-imingi imbalan dan sebagainya. Untuk menanggulangi Narasi Islamisme tersebut dunia pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam hal ini. Untuk itu dunia pendidikan menawarkan sebuah pendidikan multikultural yang didalamnya terdapat beberapa konsep yaitu, demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme.

Konsep demokrasi yang dimaksud dalam pendidikan multikultural ini bukan yang bersifat sekularis, liberalistik, dan antroposentris seperti Barat, akan tetapi demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu dan sosial, antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia dalam hal ini islam menyebutnya dengan syura bukan demokrasi liberal yang berbasis kekerasan seperti dunia Barat. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah agar dalam kelompok yang beragam serta tujuan yang beragam dapat dimusyawarahkan (shura>) untuk merumuskan suatu perkara. Dengan musyawarah diharapkan tidak akan terjadi pertentangan dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kemudian hari akan menyebabkan timbulnya Narasi-narasi yang saling memojokkan kelompok lain.

Konsep persamaan dalam pendidikan multikultural ini bukan persamaan seperti dunia Barat yaitu hanya mengakui persamaan hukum dimana mereka

dianggap sama dan harus setara dimuka hukum. Persamaan yang diinginkan ialah bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam segala hal, karena mereka memang sama. Yang membedakan bukanlah hal-hal yang bersifat kontemporer dan fisik seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya akan tetapi hal-hal yang bersifat kualitatif, moralitas, spiritualitas dan amal perbuatannya seperti keimanan, ketaqwaan, ketinggian akhlaknya. Sehingga timbul konsep yang menuntut penghapusan hukum dan hak-hak istimewa yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, persamaan kesempatan dalam pendidikan merupakan prioritas utama karena pendidikan dapat menciptakan mobilitas sosial yang mana semakin tinggi pendidikan hampir dipastikan dapat meningkatkan prestise, kemampuan dan kekayaan yang tinggi.

Konsep kebebasan, kebebasan bagi mereka kaum Barat adalah membiarkan segala yang diinginkan manusia sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya, berupa kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akan tetapi bukan kebebasan yang demikian yang ada dalam pendidikan multikultural yakni sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dikendalikan oleh kebebasan orang lain, kebebasan yang dibatasi hukum, adat istiadat, moral dan kesepakatan bersama.

Konsep pluralisme atau keragaman yang yang mendatangkan keberkahan dan nilai tambah bagi manusia yang mana hal tersebut didasarkan pada perilaku yang saling menghargai, menghormati, memanfaatkannya secara produktif untuk kepentingan bersama, saling meminta dan memberi, saling menunjang dan menopang, saling berbagi pengalaman kehidupan masing-masing, rasa tidak saling mengganggu dan mencampuri urusan masing-masing, dan selalu mencari titik temu untuk kebaikan bersama.

SIMPULAN

Dari paparan di atas, mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk di implementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Manusia dalam al-Qu'an disebutkan dengan menggunakan berbagai kata salah satunya dengan kata *al-na^{as}*. Kata tersebut menjelaskan bahwasannya manusia secara sosiologis terdiri dari jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai-nilai, tradisi, budaya dan lain sebagainya yang beraneka ragam. Seharusnya manusia memanfaatkan keanekaragaman ini sebagai bahan-bahan kebutuhan hidupnya, karena secara naluriah manusia adalah makhluk yang membutuhkan keberadaan orang lain. Wacana ini dimaksudkan untuk menanggulangi narasi islamisme

dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural di berbagai jenjang pendidikan. Ini berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama) harus diteguhkan. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. Pendidikan multikulturalisme dengan keempat pilarnya menghendaki terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, kesamaan, kebebasan, dan berwawasan pluralisme. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berbasis pada keseimbangan antara kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan, antara kepentingan individu dan sosial, antara mayoritas dan minoritas. Konsep multikultural tersebut yang harus menjadi visi-misi dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh pendidikan. Dengan pendidikan multikultural diharapkan generasi selanjutnya yang telah mengenyam pendidikan mampu menciptakan lingkungan, bangsa yang tak lagi memunculkan narasi Islamisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Azra, Azyumardi. 2007. —Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia. || <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>.
- Fikri, Zainal. "Narasi Dederadikalisasi di Media Online Republika dan Ar Rahmah", Jurnal Lektur Keagamaan. Vol. 11 No. 2 (2013).
- Fitri, Susi. "Multikulturalisme". dalam <http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2010.
- Heywood, Andrew. 2007. Political Ideologies (4th Edition). Palgrave: McMillan.
- Ichtiyanto. 2005. Masyarakat Majemuk dan Kerukunan Hidup Beragama dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Setelah "Bela Islam", Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial," Jurnal Maarif. Vol. 11 No. 2 (Desember 2016).
- Mahmudi., Zulaeha, Ida., dan Supriyanto, Teguh. "Menulis Narasi dengan Metode Karyawisata dan Pengamatan Objek Langsung Serta Gaya Belajarnya," Jurnal Journal of Primary Education. Vol. 2 (Januari 2013).
- Mudzar, M. Atho. 2005. Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan

- Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI. Konsep Multikulturalisme.
- Mudzakkir, Amin. "Islam dan Politik di Era Kontemporer," Jurnal Epistemé. Vol. 11, No. 1, (Juni 2016).
- Naim, Ngainun., & Sauqi, Achmad. Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Nasikun. 1989. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Noris, Pippa. (2000). Global Governance and Cosmopolitan Citizens, dalam Joseph. Nye and John D. Donahue, Governance in a Globalizing World, Washington: Brookings Institution Press.
- Parekh, Bikhu. 2001. Rethinking Multiculturalism. Harvard.
- Puspita, Hari. "Tradisi Petan dan Medsos," Majalah Al-Fikr. (Mei-Oktober 2017).
- Ummah, Sun Choirol. "Akar Radikalisme Islam di Indonesia," Jurnal Humanika. No.12 (September 2012).